LEMBAR EDARAN DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Nomor Agenda Diterima Tang		gal	Tingkat Surat
1483/Dt.8.1/11/2017 01 Nopember 20		17	Rahasia / Segera / Biasa
		astruktur antara lain melalui Credit dan Green Infrastructure Financing Disposisi :	
<u>Catatan:</u> Tolong mintar biga Jast Telat despo		. 8; sha in 10a,	re bohon 2 mg a jan 8hologio . 2/11/2011
			Teni Widuriyanti



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Jakarta 10710 Tlp.021-3521843, Fax. 021-3521836

Nomor

: UND - 96 /D.I.M.EKON/10/2017

24 Oktober 2017

Lampiran Hal

: 1 (satu) Berkas

: Undangan Rapat

Kepada Yth.:

(mohon periksa daftar terlampir)

di _

Jakarta

Schubungan dengan Stepping Investment for Growth Acceleration Program (SIGAP) TA Subprogram 3 yang merupakan kerjasama dengan ADB dan KfW dimana salah satu pilarnya yaitu fasilitasi pembiayaan infrastruktur jangka panjang, maka Tim TA ADB akan memaparkan pengalaman ADB terkait hal ini, bersama ini kami mengundang Saudara atau pejabat yang mewakili pada FGD tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal

: Kamis, 2 November 2017

Waktu

: 09.00 WIB - sclesai

Tempat

: Ruang Serayu Lt.3, Gedung Ali Wardhana

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat.

Pimpinan Rapat : Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

Agenda

: 1. Alternatif Pembiayaan Infrastruktur antar lain melalui credit

enhancement, Obligasi Daerah, dan green infrastructure financing

2. Sharing knowledged tentang municipal financing di India

Mengingat pentingnya acara dimaksud, mohon dapat hadir tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

> Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi lakro dan Keus

LAMPIRAN UNDANGAN

Nomor : UND - 96 /D.I.M.EKON/10/2017

Tanggal: 24 Oktober 2017

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

- 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
- 3. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan
- 4. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Kementerian Keuangan
- 5. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- 6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Bappenas
- 7. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan
- 8. Asian Development Bank (ADB)